

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi fungsi penanggulangan bencana yang telah di laksanakan oleh kepala pelaksana antara lain koordinasi dan supervisi dengan TNI- AD, TNI-AU, BPBD/TRC/BRIMOB dan BMKG. Serta telah memberikan sejumlah bantuan personil kepada BPBD Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan dan Meranti sedangkan Kepala Bidang juga telah melaksanakan penanggulangan bencana antara lain pemeberian masker, mesin genset, selang pipa dan selang penyedot dan Implementasi Penanggulangan bencana yang telah di lakukan para pegawai antara lain bekerjasama dengan TNI-AU membuat hujan buatan melalui metode Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
2. Kendala implementasi fungsi yang di hadapi oleh kepala pelaksana informasi dan penginformasian ke BNPB Pusat yang lambat di terima sehingga menyebabkan lambatnya penanggulangan bencana, di sisi lain Kepala bidang juga banyak menemui kendala yang sangat signifikan di antaranya masih ada empat kabupaten yang belum memiliki BPBD, pemantuan yang belum optimal, paradigma tanggap darurat masih kurang dan dana yang tidak mencukupi dan juga ada masalah yang lebih besar di hadapi para pegawai antara lain pemahanan aparatur pemerintah dan masyarakat masih kurang, paradigma tanggap darurat lebih dominan dari pada paradigma resiko, prasarana yang

kurang mendukung, *SOP (Standard operational procedure)* yang belum di buat dan SDM yang membidangi masih kurang.

3. Penyelesaian implementasi fungsi penanggulangan bencana yang perlu dilakukan menurut kepala pelaksana antara lain pemeberian informasi yang cepat, tepat, dan akurat dari BNPB Pusat ke BPBD Provinsi Riau, disamping itu yang di lakukan oleh kepala bidang antara lain perlu sosialisasi undang-undang kepada aparatur pemerintah serta masyarakat, inisiasi dan advokasi ke DPRD untuk pembentukan BPBD di empat kabupaten kota dengan di tambah surat edaran gubernur dan surat edaran dari BNPB Pusat dan penambahan pengalokasian dana berdasarkan standar internasional.

B. Saran

Saran penulis terhadap penelitian ini adalah:

1. Implementasi fungsi penanggulangan bencana mestinya untuk kepala pelaksana harus mampu berkoordinasi lebih luas, BNPB Pusat saja tetapi juga bisa berkoordinasi dengan Provinsi tetangga dan juga negara tetangga karena kita harus mampu memainkan peran area strategis apalagi Riau berada di kawasan strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura yang dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dan menjalin kerjasama, sedangkan untuk kepala bidang harus lebih optimal dalam menyiap timnya baik dari sub kepala bidang kesiap-siagan, sub kepala kedaruratan dan sub kepala logistik dan pemantuan dari udara harus ada dan lebih sering dan untuk pegawai koordinasi dengan tim

di berbagai BPBD kabupaten/kota harus lebih bersinergi agar penanggulangan bencana dapat di selesaikan dengan maksimal.

2. Kendala Implementasi fungsi seharusnya kepala pelaksana menyiapkan tim khusus yang berada di BNPB Pusat untuk fokus memberikan informasi yang cepat untuk BPBD, sedangkan untuk kepala bidang harus mampu membuat BPBD penghubung untuk mengatasi permasalahan empat BPBD yang belum di selesaikan dan dapat membuat kebijakan yang benar untuk standar operasionalnya, dan untuk pegawai harus dapat membaaur dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar hubungan dan tujuan dapat di selaraskan.
3. Penyelesaian Implementasi Fungsi untuk kepala pelaksana harapannya semoga BNPB pusat dapat menyediakan tim yang maksimal untuk penginformasian kepada BPBD Provinsi Riau, untuk kepala bidang harapannya seluruh kabupaten kota pada tahun 2015 telah memiliki BPBD berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau dan untuk pegawai harapannya alokasi anggaran di APBD dapat di tambahkan dan untuk SDM dapat seleksi melalui jalur CPNS.